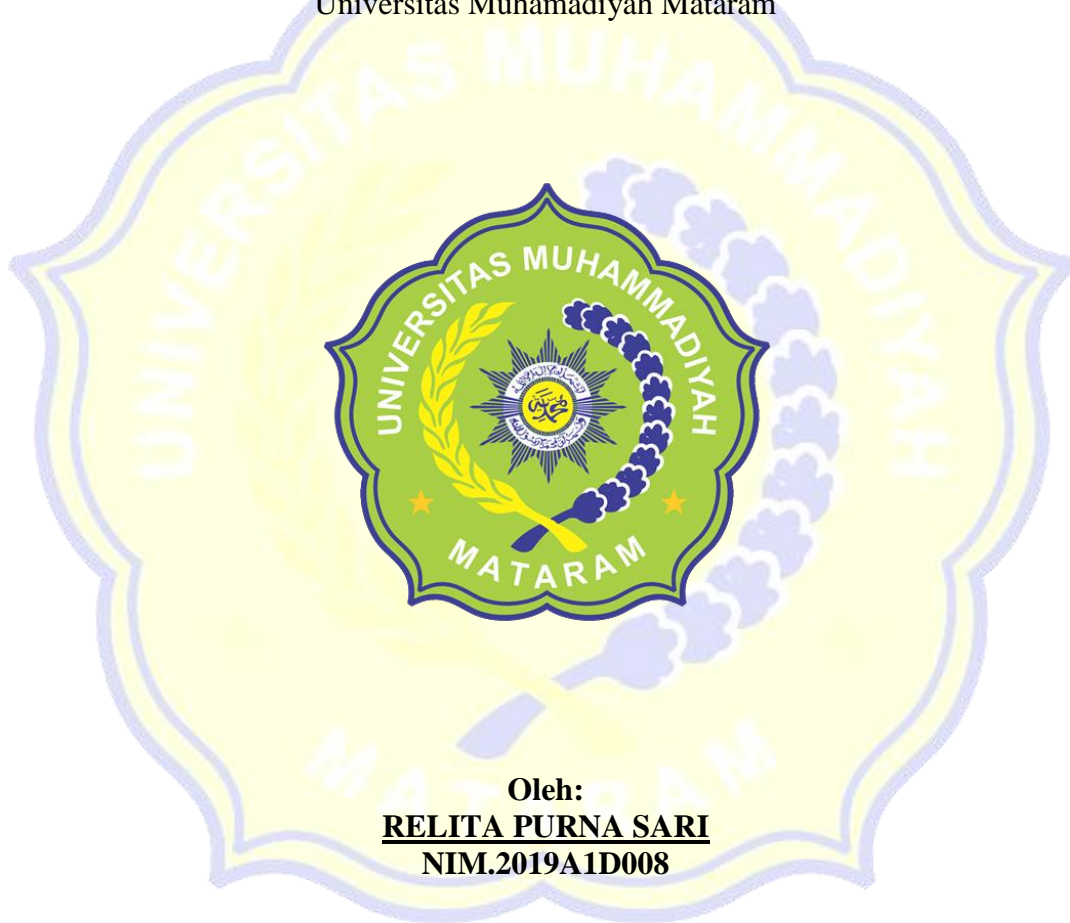


SKRIPSI

**STRATEGI PEMERINTAH DESA DALAM PENINGKATAN
KESEJATERAAN MASYARAKAT DI DESA GUNUNGSARI
KECAMATAN GUNUNGSARI**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memenuhi persyaratan dalam
memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (SI) pada Program Studi Pendidikan
Geografi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Muhamadiyah Mataram



Oleh:

RELITA PURNA SARI

NIM.2019A1D008

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN GEOGRAFI
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMADIYAH MATARAM**

2023

HALAMAN PERSETUJUAN

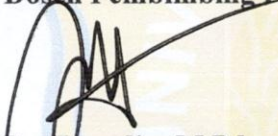
SKRIPSI

**STRATEGI PEMERINTAH DESA DALAM PENINGKATAN
KESEJATERAAN MASYARAKAT DI DESA GUNUNGSARI
KECAMATAN GUNUNGSARI**

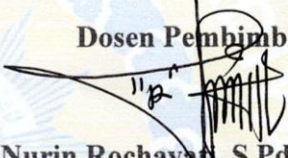
Telah memenuhi syarat dan disetujui

Tanggal 9 / 6 /2023


Dosen Pembimbing I


Dr. Junadin, M.Pd.
NIDN.0810107901

Dosen Pembimbing II


Nurin Rochayani, S.Pd., M.Pd.
NIDN.0831127321

Menyetujui:
Program Studi Pendidikan Geografi
Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan
Universitas Muhammadiyah Mataram
Ketua Program Studi,


Arif, S.Pd., M.Pd.
NIDN.0814028001

HALAMAN PENGESAHAN

**SKRIPSI
STRATEGI PEMERINTAH DESA DALAM PENINGKATAN
KESEJATERAAN MASYARAKAT DI DESA GUNUNGSARI
KECAMATAN GUNUNGSARI**

Skripsi atas nama Relita Purna Sari telah dipertahankan di depan dosen penguji Program Studi Pendidikan Geografi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Mataram

Tanggal, 14 /06 /2023

Dosen Penguji:

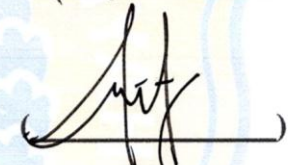
1. Dr. Junaidin, M.Pd.
NIDN. 0831127321

(Ketua)



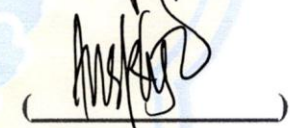
2. Arif, S.Pd .M.Pd.
NIDN.0814028001

(Anggota)



3. Dr. Siti Sanisah, M.Pd.
NIDN. 0025057514

(Anggota)



Mengesahkan:

**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM**

Dekan,


Dr. Muhammad Nizar, M.Pd.Si.
NIDN.0821078501

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya mahasiswa Program Study Pendidikan Geografi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Mataram menyatakan bahwa.

Nama : Relita Purna Sari
NIM : 2019A1D008
Alamat : Manggarai, Flores Nusa Tenggara Timur (NTT)

Memang benar Skripsi yang berjudul *Strategi Pemerintah Desa dalam peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Gunungsari Kecamatan Gunungsari* adalah asli karya sendidri dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik di tempat manapun.

Skripsi ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pemimbing. Jika terdapat orang lain yang telah dipublikasikan, memang diacu sebagai sumber dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Jika dikemudian hari pernyataan saya ini terbukti tidak benar, saya siap mempertanggung jawabkannya, termasuk bersedia menanggalkan gelar keserjanaan yang saya peroleh.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sadar dan tanpa tekanan dari pihak manapun.

Mataram, 13 Juli 2023
Yang membuat pernyataan



Relita Purna Sari
NIM2019A1D008



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

SURAT PERNYATAAN BEBAS
PLAGIARISME

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Relita Purna Sari
NIM : 2019A1D008
Tempat/Tgl Lahir : Uluwang, 25 oktober 1999
Program Studi : FKIP/ Pendidikan Geografi
Fakultas : FKIP/
No. Hp : 085 339 911 295
Email : relitasari918@gmail.com

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi/KTI/Tesis* saya yang berjudul :

STRATEGI PEMERINTAH DESA DALAM PENINGKATAN KESEJATERAAN
MASYARAKAT DI DESA GUNUSARI KECAMATAN GUNUNGSARI

Bebas dari Plagiarisme dan bukan hasil karya orang lain. 46%

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari Skripsi/KTI/Tesis* tersebut terdapat indikasi plagiarisme atau bagian dari karya ilmiah milih orang lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dan disebutkan sumber secara lengkap dalam daftar pustaka, saya **bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum** sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Mataram.

Demikain surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Mataram, 13 Juli2023
Penulis



Relita Purna Sari
NIM. 2019A1D008

Mengetahui,
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT



Iskandar, S.Sos.,M.A.
NIDN. 0802048904

*pilih salah satu yang sesuai



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT**

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

**SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN
PUBLIKASI KARYA ILMIAH**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Relita Purna Sari
 NIM : 2019A1D008
 Tempat/Tgl Lahir : Mataram, 25 oktober 1999
 Program Studi : Pendidikan Geografi
 Fakultas : FKIP
 No. Hp/Email : 085 339 911 295
 Jenis Penelitian : Skripsi KTI Tesis

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari saya selama *tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta* atas karya ilmiah saya berjudul:

STRATEGI PEMERINTAH DESA DALAM PENINGKATAN KESEJATERAAN
MASYARAKAT DI DESA GUNUNGSARI KECAMATAN GUNUNGSARI

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Mataram, 13 Juli.....2023
Penulis

Mengetahui,
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT



Relita Purna Sari
NIM. 2019A1D008

Iskandar, S.Sos., M.A.
NIDN. 0802048904

MOTTO

**KALAU TUHAN SUDAH BERKEHENDAK UNTUK MEMBERIKAN
MASA DEPAN YANG INDAH DI HIDUP KITA, MAKA TIDAK ADA
YANG MENGGAGALKANYA**



PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada Tuhan Yesus dan Bunda Maria atas penyertaan dan perlindungan sehingga skripsi ini bisa diselesaikan.

Skripsi ini kupersembahkan untuk

1. Orang tuaku tercinta (Bapak Markus Langgar dan mama Martina Dinur) yang selalu mendoakan dan selalu tabah dalam memperjuangkan cita-cita saya serta mencurakan keringatnya tanpa mengenal lelah untuk mendidik dan menyekolahkan kami anak-anaknya.
2. Untuk Adik-adikku (Natalia poha) yang mau mengalah untuk tidak kulia demi saya dan selalu mendoakan saya dan mendukung dalam perkuliahan saya selama ini.
3. Kakaku (Ermelinda Savio S.Pd sekeluarganya) terimakasih bantuan dan motivasinya yang diberikan untuk saya.
4. Untuk keluarga besar Ndawang, Watu, Ledu, Borong. Terimakasih sudah memotivasi dalam menempuh cita-cita saya selama ini.
5. Untuk teman-teman seperjuangan angkatan 2019 yang tidak bias kusebutkan namanya satu persatu. Terimakasih atas kebersamaan dan warna warni kehidupan yang kita lewati bersama.
6. Untuk semua dosen terlebih khusus dosen pembimbing yang telah membina dan membimbing dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Untuk almamaterku tercinta Universitas Muhammadiyah Mataram.
8. Untuk semua orang yang telah berjasa dalam menyukseskan cita-cita saya.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena dengan rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “*Strategi Pemerintah Desa Dalam peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Gunungsari Kecamatan Gunungsari*” dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

Selesainya penelitian ini tidak terlepas dari berbagai pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan dan arahan pada peneliti. Oleh karena itu, dengan segala hormat peneliti mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Drs.Abdul Wabah, MA selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram
2. Dr. Muhammad Nizaar, M.Pd.Si sebagai Dekan FKIP UMMAT
3. Arif, S.Pd.,M.Pd selaku Ketua Program Studi Pendidikan Geografi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Mataram.
4. Dr. Junaidin, M.Pd sebagai dosen pembimbing I yang telah banyak membimbing dan mengarahkan peneliti dari awal sampai akhir penyusunan.
5. Nurin Rochayati.,M.Pd, sebagai Dosen Pembimbing II yang telah banyak membimbing dan mengarahkan peneliti dengan penuh kesabaran, keikhlasan, dan perhatiannya sehingga skripsi ini bias terselesaikan, dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang juga telah memberikan kontribusi mempelancar penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapan, akhirnya penulis berharap skripsi ini dapat memberi manfaat bagi pengembangan dunia pendidikan.

Mataram, 13 Juli 2023

Penulis,

Relita Purna Sari
NIM2019A1D008

Relita Purna Sari 2023: **Strategi Pemerintah Desa Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Gunungsari Kecamatan Gunungsari.** Skripsi. Mataram: Universitas Muhammadiyah Mataram.

Pembimbing 1 : Dr. Junadin, M.Pd.
Pembimbing 2 : Nurin Rochayati, S.Pd., M.Pd.

ABSTRAK

Banyak upaya yang dapat dan sudah dilakukan pemerintah desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi pemerintah desa Gunungsari Kecamatan Gunungsari dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, metode dan ditentukan dengan teknis informan adalah *purposive sampling*, pengumpulan data menggunakan metode wawancara disertai observasi dan dokumentasi. Data hasil penelitian dianalisis dengan langkah *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/verification*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya pemerintah Desa Gunungsari dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Gunungsari dilakukan melalui pemberdayaan pembuat gula merah serta pengrajin kursi telah direspon positif oleh masyarakat sebagai program yang berbasis sosial kemasyarakatan. Kendala yang dihadapi tidak menjadi penghambat dalam pelaksanaan pengembangan ekonomi masyarakat. Menyadari hal itu, Pemerintah Desa Gunungsari dimasa yang akan datang akan mengevaluasi program tersebut demi kesuksesan program-program yang dinilainya membawa dampak positif bagi kehidupan masyarakat Desa Gunungsari.

Kata kunci: Strategi Pemerintah Desa, Meningkatkan kesejahteraan masyarakat

Relita Purna Sari 2023: **Government Village Strategies in Improving the Welfare of the Community in Gunungsari Village, Gunungsari Subdistrict.** Undergraduate Thesis. Mataram: Muhammadiyah University of Mataram.

Consultant 1: Dr. Junadin, M.Pd.

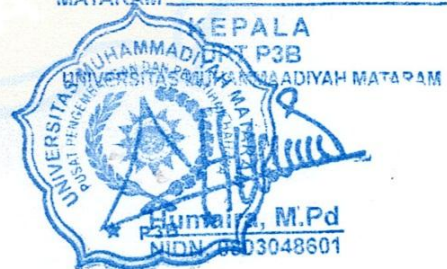
Consultant 2: Nurin Rochayati, S.Pd., M.Pd.

ABSTRACT

The village government can and has made numerous efforts to enhance welfare. This study seeks to determine the strategies utilized by the Gunungsari village government in the Gunungsari Subdistrict to improve community welfare. This study employed a qualitative descriptive methodology, and the informants were selected using purposive sampling. The compilation of data consisted of interviews, observations, and documentation. The research data were analyzed through data reduction, presentation, and conclusion drawing/verification. The study's findings indicate that the Gunungsari Village government has improved the community's welfare by empowering brown sugar producers and chair artisans through socially-oriented programs, to which the community has responded positively. Community economic development was carried out despite the obstacles encountered. Recognizing this, the Gunungsari Village government will evaluate the effectiveness of these programs in the future to determine their positive impact on the Gunungsari Village community.

Keywords: Village Government Strategies, Improving Community Welfare

MENGESAHKAN
SALINAN FOTO COPY SESUAI ASLINYA
MATARAM



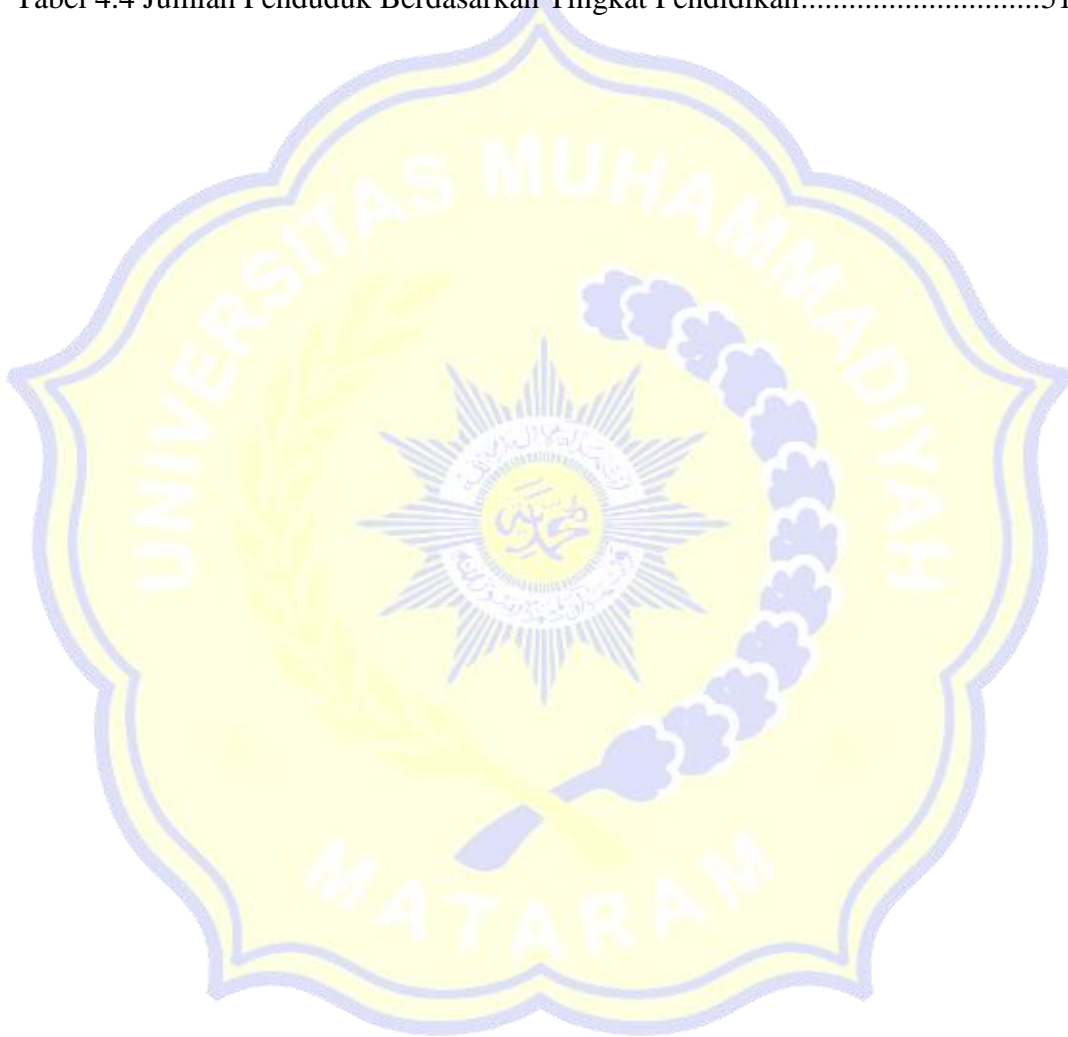
DAFTAR ISI

SKRIPSI	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN	iii
SURAT PERNYTAAN BEBAS PLAGIARISME	v
SURAT PERNYTAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Masalah	4
1.4 Manfaat Penelitian.....	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Penelitian Yang Relevan	6
2.2 Kajian Tentang Strategi Pemerintah Desa.....	7
2.2.1 Pengertian Strategi	7
2.2.2 Pemerintah Desa.....	12
2.3 Kesejahteraan Masyarakat.....	23
2.4 Kerangka Penelitian.....	26
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Rancangan Penelitian	28
3.2 Lokasi Penelitian	30

3.3	Jenis dan Sumber Data	31
3.3.1	Jenis Data	31
3.3.2	Sumber Data.....	31
3.4	Metode Penentuan Informan Penelitian	32
3.4.1	Pengertian Informan.....	32
3.4.2	Metode Penentuan Informan	33
3.4.3	Cara Menentukan Informan	34
3.4.4	Macam-macam informan	34
3.5	Metode Pengumpulan Data	35
3.5.1	Metode Observasi.....	36
3.5.2	Metode Wawancara.....	37
3.5.3	Metode Dokumentasi	39
3.6	Instrumen Penelitian.....	40
3.7	Metode Analisis Data	41
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN		
4.1	Deskripsi Hasil Penelitian	44
4.1.1	Gambaran Lokasi Penelitian	44
4.1.2	Hasil Penelitian	52
4.2	Pembahasan	62
BAB V PENUTUP		
5.1	Simpulan.....	68
5.2	Saran.....	68
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN		

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin.	48
Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Sesuai Agama	49
Table 4.3 Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian	50
Tabel 4.4 Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	51



DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Proses Analisis Data.....	43
Gamabr 4.2 Bagan struktur peningkatan Desa Gunungsari.....	44



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut hukum formal, desa diakui sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah dan berwenang mengatur serta mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai organisasi politis, desa memiliki kekuasaan untuk memerintah dan mengontrol warga atau masyarakatnya. Pemerintah daerah memiliki hak untuk membangun desa sesuai dengan hak kolektif desa. Oleh karena itu, desa memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung keberhasilan pemerintahan nasional secara meluas. (Lai dan Bosin, 2016).

Pemahaman yang mendalam mengenai konsep strategi dan konsep terkait lainnya merupakan faktor krusial dalam menentukan keberhasilan perumusan strategi. Strategi memiliki dua pengertian yang saling melengkapi. Pertama, strategi merupakan kombinasi antara ilmu dan seni dalam memanfaatkan semua sumber daya yang dimiliki negara untuk melaksanakan kebijakan tertentu. Kedua, strategi juga merujuk pada perencanaan kegiatan yang teliti guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Menurut B.N. Marbun (2003: 341), strategi dapat diartikan sebagai perencanaan kegiatan yang cermat untuk mencapai tujuan tertentu yang

saling terkait dalam waktu dan besaran yang ditentukan. Dalam pelaksanaannya, strategi akan memanfaatkan semua sumber daya yang tersedia dalam batas waktu dan ukuran tertentu guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, strategi yang dihasilkan dapat dimanfaatkan dengan mengikuti konsep strategi yang dikemukakan oleh David (2006:12). Strategi merupakan cara yang digunakan untuk mencapai tujuan jangka panjang yang telah ditetapkan oleh suatu organisasi. Oleh karena itu, keterlibatan masyarakat sebagai subjek utama pembangunan merupakan salah satu strategi yang perlu dilaksanakan untuk mencapai tujuan tersebut.

Kemakmuran merujuk pada keadaan di mana seseorang memiliki pendapatan dan kekayaan yang melimpah, sementara perdamaian mengacu pada keadaan yang aman, tenteram, dan sejahtera. Kehidupan yang aman berarti tanpa bahaya dan kecemasan, sedangkan sentosa didefinisikan sebagai negara yang bebas dari kesulitan dan bencana. Hidup damai berarti hidup tanpa kekacauan, sementara kemakmuran berarti hidup yang serba berkecukupan dan tidak kekurangan. Pembangunan ekonomi sektor pertanian bertujuan untuk meningkatkan produksi dan pendapatan petani. Kecamatan Gunungsari memiliki mayoritas masyarakat yang bekerja di sektor pertanian, sehingga peningkatan pembangunan di sektor ini akan meningkatkan taraf hidup masyarakat secara signifikan.

Pada tahun 2017, kecamatan Gunungsari mengalami peningkatan produksi pertanian yang signifikan. Selain memiliki lahan yang subur, keberhasilan ini juga dapat dikaitkan dengan penggunaan teknologi yang tepat, pengetahuan yang baik, teknik pengelolaan air yang efisien, dan pemeliharaan yang baik. Sebagai sebuah kota yang masih memiliki nuansa pedesaan, sektor pertanian memainkan peran penting dalam perekonomian kecamatan Gunungsari. Data produksi pertanian pada tahun tersebut mencatat hasil yang mengesankan. Lahan seluas 1.850 hektar digunakan untuk menanam padi, menghasilkan total produksi sebanyak 9.177 ton. Selain itu, jagung ditanam di lahan pertanian seluas 200,80 hektar dengan produksi sebesar 747 ton. Singkong, ubi jalar, kacang tanah, kedelai, dan kacang hijau juga berhasil diproduksi dengan jumlah yang mengesankan.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dilihat bahwa perekonomian pertanian di kecamatan Gunungsari pada tahun 2017 mengalami peningkatan yang signifikan. Pendapatan petani setiap tahunnya terus meningkat, menunjukkan perkembangan yang positif dalam sektor pertanian. Hal ini menunjukkan bahwa upaya meningkatkan produksi pertanian melalui penggunaan teknologi yang tepat, pengetahuan yang baik, teknik pengelolaan air yang efisien, dan pemeliharaan yang baik telah berhasil memberikan dampak positif bagi perekonomian kecamatan Gunungsari.

Meningkatkan pembangunan ekonomi di masa kini menjadi semakin penting mengingat paradoks yang terjadi dalam pengalaman pembangunan ekonomi di berbagai negara. Meskipun negara-negara yang miskin sumber

daya alam dapat memiliki kinerja pembangunan ekonomi yang sama atau bahkan lebih baik daripada negara yang kaya akan sumber daya alam, kehadiran ekonomi dapat mempercepat pembangunan ekonomi dan mendorong globalisasi ekonomi. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka perlu dilaksanakan penelitian tentang **“Strategi Pemerintah Desa Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Gunungsari Kecamatan Gunungsari Tahun 2022”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini yaitu. “Bagaimana strategi pemerintah desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Gunungsari Kecamatan Gunungsari?”

1.3 Tujuan Masalah

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi pemerintah desa dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat di Desa Gunungsari Kecamatan Gunungsari.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Praktis

1. Bagi masyarakat

Dengan adanya strategi pemerintah desa menjadi solusi dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.

2. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan pemerintah kota Mataram

3. Bagi peneliti

a. Untuk menambah pengalaman dan pengetahuan peneliti tentang” Strategi Pemerintah Desa dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Gunungsari Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barta”.

b. Sebagai bahan referensi dan perbandingan bagi peneliti berikutnya yang akan melakukan pengkajian masalah yang relevan

1.4.2 Manfaat Teoritis

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan ilmu pengetahuan terutama bagi penulis

2. Penelitian ini dapat menambah informasi dan referensi bacaan bagi semua pihak yang membutuhkannya

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Yang Relevan

Bersumber pada penelusuran pustaka yang dilakukan, penulis menemukan beberapa penelitian yang membahas tentang strategi pemerintah desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat anatar lain:

Penelitian Erlin Damayanti (2014: 11) yang berjudul “Strategi *Capacity Buliding* Pemerintah Desa dalam pengembangan Potensi Komponen Ekowisata Berbasis Masyarakat Lokal”, Menurut penelitian ini, otonomi desa sejati adalah otonomi yang bulat dan utuh, bukan hanya pemberian dari pemerintah pusat. Pemahaman ini didasarkan pada asumsi bahwa pemerintah desa memahami kebutuhan masyarakatnya dan memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengembangkan sumber daya desa secara mandiri. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan seiring dengan kemandirian desa.

Penelitian Wahyuni (2018: 16) yang berjudul” Strategi Pemerintah Desa dalam meningkatkan Kualitas Pelayanan Pubelik di kantor Desa Massmatur Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar”, Menurut penelitian tersebut, desa merupakan organisasi pemerintahan terendah yang berada di bawah kecamatan dan merupakan organisasi pertama yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Sebagai sumber utama dan pertama dari berbagai data dan informasi yang dibutuhkan oleh pemerintah dalam rangka penyusunan rencana pembangunan daerah dan nasional, desa

memberikan pelayanan, pendampingan, dan menangani berbagai urusan di tingkat masyarakat. Oleh karena itu, administrasi desa harus disesuaikan dengan kebutuhan semua instansi pemerintahan yang lebih tinggi. Beberapa register seperti kependudukan dan luas tanah harus dikelola oleh desa selama masih bersifat umum.

Penelitian yang dilakukan oleh Rena Maulidiana (2020: 37) yang berjudul “Strategi Pemerintah Desa dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui program Bada Usah Milik Desa di Desa Labuan Mapin Kecamatan Alas Barat Kabupaten”, Penelitian ini menunjukkan bahwa tujuan utama pendirian pemerintahan adalah menjaga ketertiban umum agar warga negara dapat hidup normal. Pemerintahan yang baru berfokus pada pelayanan kepada masyarakat, bukan untuk kepentingan diri sendiri. Tujuan utama pemerintah desa adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat, seperti meningkatkan kesejahteraan rakyat dan membantu fakir miskin.

Kedua penelitian tersebut memiliki kesamaan dalam menjelaskan strategi pemerintah desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, namun perbedaan di antara keduanya terletak pada fokus objek penelitian.

2.2 Kajian Tentang Strategi Pemerintah Desa

2.2.1 Pengertian Strategi

Menurut Nilasari (2014:2), strategi adalah serangkaian tindakan yang terpadu dan terkoordinasi untuk memanfaatkan kompetensi inti dan mencapai keunggulan kompetitif. Kegiatan yang terpadu dan terkoordinasi ini melibatkan kreativitas sumber daya

manusia yang tak terbatas untuk mencapai leverage yang lebih baik. Sementara itu, pemanfaatan kompetensi inti bertujuan untuk menggunakan pengetahuan, keterampilan, pengalaman individu, dan kerja tim dalam semua tindakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan organisasi.

Dalam rangka mencapai kesejahteraan sosial, negara perlu merancang strategi yang matang dengan memperhatikan beberapa indikator yang telah dijabarkan oleh Arsyad dkk (2011:27). Indikator-indikator tersebut meliputi infrastruktur (baik fisik, ekonomi, pendidikan, maupun kesehatan), kebutuhan pendidikan, kondisi kesehatan, pembangunan pertanian, tingkat industri, pengembangan usaha non pertanian, tingkat bencana yang dapat ditangani, aspek kelembagaan dan modal sosial, serta aspek sosial budaya yang berkontribusi pada tercapainya kemakmuran masyarakat. Dengan memperhatikan indikator-indikator ini, diharapkan negara dapat menciptakan strategi yang efektif untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya.

Pemahaman yang mendalam tentang konsep strategi dan konsep terkait lainnya menjadi kunci keberhasilan dalam merumuskan strategi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1988), strategi dapat diartikan sebagai ilmu dan seni dalam memanfaatkan semua sumber daya yang dimiliki untuk melaksanakan kebijakan tertentu, serta sebagai perencanaan kegiatan yang teliti untuk mencapai tujuan yang

ditetapkan. B.N. Marbun (2003: 341) juga mengemukakan bahwa strategi adalah perencanaan kegiatan yang cermat untuk mencapai tujuan tertentu, yang melibatkan aspek waktu dan ukuran. Dengan demikian, strategi dapat dianggap sebagai kombinasi antara ilmu dan seni dalam menyusun rencana yang matang, dengan memanfaatkan semua sumber daya yang tersedia dalam batasan waktu dan ukuran tertentu, guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, strategi adalah suatu rencana yang terencana dengan baik untuk mencapai tujuan yang ditentukan. Asal usul kata "strategi" berasal dari bahasa Yunani "strategia" yang berarti "ancaman sang jenderal" atau seni seorang komandan yang sering digunakan dalam konteks perang.

1. Defenisi Umum

Strategi adalah suatu proses di mana para pemimpin organisasi menentukan rencana yang serius untuk mencapai tujuan jangka panjang organisasi. Proses ini melibatkan penyiapan metode atau cara untuk mencapai tujuan tersebut.

2. Defenisi Khusus

Strategi adalah suatu pendekatan yang terus berkembang dan terus berlanjut, yang didasarkan pada antisipasi kebutuhan pelanggan di masa depan. Dengan demikian, strategi tidak hanya berfokus pada situasi saat ini, tetapi juga melibatkan proyeksi dan perkiraan tentang apa yang mungkin terjadi.

a. konsep strategi

Menurut Chandler (dalam Kuncoro 2016:21), strategi melibatkan penentuan tujuan dan sasaran jangka panjang organisasi, pelaksanaan tindakan, dan alokasi sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Salusu (2006:101) mendefinisikan strategi sebagai seni yang menggunakan keterampilan dan sumber daya suatu organisasi untuk mencapai tujuan melalui hubungan yang efektif dengan lingkungannya dalam kondisi yang saling menguntungkan. Andrew (2015:19) mengatakan bahwa strategi adalah pola keputusan untuk memilih dan menentukan target, sasaran, atau tujuan yang menghasilkan kebijakan dan merencanakan langkah-langkah untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

Menurut Iman Mulyana (2010:45), strategi adalah ilmu dan seni memanfaatkan kemampuan terbaik dengan sumber daya dan lingkungan secara efektif. Ada empat unsur penting dalam arti kata strategi, yaitu kemampuan, sumber daya, lingkungan, dan tujuan. Keempat unsur ini digabungkan secara rasional dan indah untuk menghasilkan beberapa pilihan alternatif yang kemudian dievaluasi dan dipilih yang terbaik. Keputusan tersebut kemudian diumumkan secara eksplisit sebagai pedoman strategi yang akan diimplementasikan dalam tindakan operasional.

Strategi tidak dapat dipisahkan dari struktur, perilaku, dan budaya di mana proses tersebut berlangsung. Proses strategi memiliki dua aspek penting yang saling berhubungan, yaitu formulasi dan implementasi (Andrew, 2015:25). Aspek-aspek ini diperlukan untuk tujuan analisis dan pengembangan strategi yang efektif.

Langkah-langkah untuk mewujudkan strategi tersebut ialah:

1. Tahap perencanaan, yang pertama kali disebut sebagai serangkaian keputusan yang terkondisi, menentukan langkah-langkah yang harus diambil untuk menghadapi berbagai situasi yang mungkin terjadi di masa mendatang.
2. Tahap Implementasi, pada tingkat ini, melibatkan penerapan strategi yang ada dengan memanfaatkan semua potensi yang dimiliki untuk mencapai tujuan yang ditetapkan...

Untuk merumuskan strategi yang efektif, seorang pemimpin harus mempertimbangkan berbagai faktor seperti tujuan, kemampuan, sumber daya, dan lingkungan. Strategi haruslah konsisten dengan lingkungan, memiliki strategi alternatif, fokus pada keunggulan secara keseluruhan, mempertimbangkan risiko, dan dilengkapi dengan tanggung jawab sosial.

Dalam merumuskan strategi, penting untuk menyampaikan informasi tentang apa yang akan dilakukan, mengapa dilakukan

dengan cara tersebut, siapa yang bertanggung jawab dan mengoperasikannya, berapa biayanya, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengimplementasikannya, dan hasil apa yang akan didapatkan. Pengabaian kualitas dan kuantitas dapat membuka keberadaan *point of attack* pesaing, sehingga strategi harus memperhatikan hal ini. Dalam kesimpulannya, strategi adalah cara seorang pemimpin dalam menjalankan tugasnya dengan memperhatikan situasi dan kondisi yang ada serta aspek-aspek yang mempengaruhinya.

2.2.2 Pemerintah Desa

Menurut Kartohadikusumo (2008:16), desa adalah suatu wilayah di mana penduduknya saling mengenal, hidup bersama, memiliki adat istiadat yang sama, serta memiliki tata cara tersendiri dalam mengatur kehidupan masyarakat. Secara etimologis, istilah desa berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu turunan dari istilah "*deshi*" yang berarti "tanah kelahiran" atau "tanah tumpah darah". Dari kata *deshi*, terbentuklah kata kampung. Dalam pengertian umum, desa (atau dengan nama lain sesuai bahasa setempat) dapat dianggap sebagai kawasan terkecil yang dikelola secara formal dan mandiri oleh kelompok masyarakat yang tinggal di dalamnya. Mereka mengikuti aturan yang disepakati bersama dengan tujuan menciptakan ketertiban, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Hal ini dianggap sebagai hak dan tanggung jawab bersama dari kelompok masyarakat.

Desa merupakan elemen penting dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai pelopor sistem pemerintahan di tingkat daerah, peran masyarakat desa sangat mencerminkan implementasi demokrasi dalam pemerintahan desa serta memimpin pelaksanaan kehidupan demokrasi bagi setiap warga negara.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa didefinisikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan republik Indonesia.

Pemerintahan desa merupakan satuan pemerintahan yang paling dasar dalam hirarki pemerintahan nasional. Pemerintahan desa memiliki peran penting dalam penyelenggaraan pelayanan publik karena langsung melayani masyarakat. Pemerintah desa diharapkan menjadi unit lembaga pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat, dengan tujuan menjalankan roda pemerintahan desa dengan tekun dan mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat menuju kesejahteraan, keadilan, kedamaian, keamanan, dan keselamatan.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjelaskan bahwa Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang

disebut dengan nama lain, dibantu oleh perangkat desa sebagai unsur pemerintahan desa. Dalam menjalankan tugasnya, pemerintah desa memiliki tanggung jawab untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa serta memastikan terciptanya kesejahteraan dan kemajuan bagi masyarakat desa tersebut.

Lebih lanjut, Widjaja (2003:165) menjelaskan bahwa otonomi desa adalah bentuk otonomi yang sepenuhnya, menyeluruh, dan independen, bukanlah sekadar pemberian dari pemerintah pusat. Konsep ini didasarkan pada asumsi bahwa pemerintah desa memiliki pemahaman yang mendalam tentang kebutuhan masyarakat setempat, sehingga desa memiliki kemampuan untuk mengatur dan mengembangkan sumber daya secara mandiri. Dalam konteks ini, peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan menjadi penting.

Pemerintah desa, juga dikenal sebagai pedesan, merupakan badan pemerintahan yang bertanggung jawab dalam mengelola wilayah tingkat desa. Lembaga ini diatur melalui Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Desa, yang dikeluarkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 216 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Kecamatan. Kepala Pemerintahan Desa, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 14 ayat (1), adalah kepala desa yang bertanggung jawab dalam menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, dan urusan sosial.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pemerintahan desa adalah bentuk pemerintahan terendah yang dipimpin oleh kepala desa atau lura, yang mengurus urusan rumah tangga desa dan terdiri dari kepala desa dan dewan desa. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa terdiri dari kepala desa dan perangkat desa sebagai unsur pelaksana pemerintahan desa.

Fungsi pemerintah desa adalah mengatur dan mengurus pemerintahan di tingkat desa, di mana semua kegiatan di desa dikoordinasikan oleh kepala desa. Menurut Bayu Suryaningrat, pemerintahan desa adalah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan oleh organisasi pemerintahan terendah di bawah kepala daerah, yaitu pemerintah desa dan pemerintah daerah.

Desa merupakan organisasi pemerintahan terendah di bawah kecamatan dan merupakan organisasi pertama yang berinteraksi langsung dengan masyarakat. Oleh karena itu, desa menjadi sumber utama dan pertama dalam menyediakan berbagai data dan fakta yang diperlukan oleh pemerintah dalam merumuskan rencana pembangunan daerah maupun nasional.

1. Konsep Pemerintah Desa

Menurut Kartohadikusumo (2008:16), desa merupakan pionir dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memainkan peran sentral dalam menerapkan demokrasi di tingkat daerah. Peran masyarakat desa

mencerminkan sejauh mana demokrasi diimplementasikan dalam pemerintahan desa dan mengarahkan kehidupan demokrasi bagi warga negara. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pemerintahan secara etimologis berarti memberi perintah dan merujuk pada sebuah lembaga yang terdiri dari sekelompok orang yang mengatur masyarakat dengan berbagai metode dan strategi untuk mencapai ketertiban. Pemerintahan desa sudah ada dalam sistem pemerintahan di Indonesia sejak lama, bahkan sebelum Indonesia merdeka.

Menurut Juliantara (2007:18), desa juga dapat dipahami secara sosial budaya sebagai komunitas di suatu wilayah geografis tertentu, di mana anggotanya saling mengenal dengan baik dan hidup dengan pola hidup yang sederhana, tergantung pada sumber daya alam. Oleh karena itu, desa sering dikaitkan dengan masyarakat yang hidup sederhana di sektor pertanian, memiliki ikatan sosial, adat, dan tradisi yang kuat, serta tingkat pendidikan yang rendah.

Dalam sistem pemerintahan Indonesia, desa dikenal sebagai pemerintahan desa yang merupakan tingkatan pemerintahan terendah dan diatur oleh undang-undang. Beberapa ahli, termasuk Roucek dan Warren (dalam Rianto, 2010:78), mendefinisikan desa sebagai entitas yang diwariskan dari generasi ke generasi, meliputi penduduk dan struktur kelembagaannya di

wilayah tempat mereka tinggal, seperti di sawah atau di desa yang menjadi pusat kegiatan sosial, gotong royong, pertukaran jasa, bantuan, dan partisipasi masyarakat.

Menurut Bintarto (dalam Sadu Wasistiono, M. Irwan Tahir 2007:8), desa didefinisikan sebagai hasil interaksi antara kelompok orang dengan lingkungan geografisnya. Interaksi tersebut menciptakan suatu bentuk atau tampilan di muka bumi yang dipengaruhi oleh unsur-unsur fisiografis, sosial ekonomi, politik, dan budaya yang berinteraksi satu sama lain serta berhubungan dengan wilayah lain.

Pemerintahan desa menyediakan layanan, pendampingan, dan mengurus berbagai urusan pada tingkat masyarakat. Oleh karena itu, pengembangan desa harus disesuaikan dengan kebutuhan pemerintahan yang lebih tinggi. Beberapa informasi umum, seperti jumlah penduduk dan luas tanah, harus dikelola oleh desa.

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa desa harus memiliki tiga unsur utama, yaitu wilayah, penduduk, dan pemerintahan desa. Ketiga unsur tersebut harus tercermin dalam ketersediaan fasilitas yang memadai untuk desa.

Berdasarkan peraturan pemerintah, tugas utama pemerintah desa ialah melaksanakan tugas pemerintah kabupaten

yang menjadi kewenangan kecamatan. untuk melaksanakan tugas tersebut pemerintah desa mempunyai fungsi:

- 1) Administrasi pelayanan di bidang pemerintahan, pelayanan, pembangunan dan juga kesejahteraan masyarakat.
- 2) Meningkatkan partisipasi masyarakat dari anggota masyarakat,
- 3) Membina kerukunan, ketenteraman, dan juga ketertiban bagi seluruh anggota masyarakat,
- 4) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan juga fungsinya.

Tujuan yang ingin dicapai pemerintah desa ialah mampu menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi baik dalam bidang politik maupun pembangunan umum.

2. Struktur Organisasi Pemerintah Desa

Efisiensi dan efektivitas kelembagaan pemerintahan desa merupakan tujuan utama dari struktur organisasi pemerintahan desa agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penyelenggaraan pemerintahan desa melibatkan struktur dan susunan organisasi yang jelas. Keberadaan struktur organisasi yang terdefinisi dengan baik dalam pemerintahan desa akan mempermudah pelaksanaan tugas-tugasnya. Oleh karena itu, kinerja yang jelas diperlukan dalam penyelenggaraan pemerintahan

desa untuk memastikan kelancaran pelaksanaan tugas-tugas tersebut.

Hal yang sama juga diungkapkan bahwa struktur organisasi penting bagi pemerintah desa dalam menjalankan tugas-tugasnya agar dapat berperan dan berfungsi dengan baik, sehingga dapat memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat. Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa disebutkan bahwa susunan pemerintahan desa meliputi:

- a) pemerintah desa terdiri dari kepala desa dan juga perangkat desa, perangkat desa terdiri dari unsur pegawai, unsur pelaksana dan juga unsur kecamatan.
- b) susunan pemerintahan desa ialah lampiran dari peraturan daerah dan juga ialah bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah. ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pemerintahan desa diatur dalam surat keputusan bupati.

3. Tugas Pemerintah Desa

Pemerintahan Desa ialah unsur-unsur penyelenggaraan pemerintahan umum yang ialah tugas pokok pemerintahan desa disamping fungsi lain untuk melengkapi tugas, kewajiban, wewenang dan juga tanggung jawab pemerintahan desa yang bersangkutan.

1) Tugas Kepala Desa

Tugas dan kewajiban kepala desa adalah sebagai berikut:

- a) memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa,
- b) membina kehidupan masyarakat desa,
- c) membina perekonomian desa,
- d) memelihara ketentraman dan juga ketertiban masyarakat desa,
- e) mendamaikan perselisihan masyarakat di desa,
- f) mewakili desa di dalam dan juga di luar pengadilan dan juga bisa juga melalui surat kuasa.

2) Tugas Aparatur Pemerintah Desa

Aparatur pemerintah desa bertugas membantu kepala desa, aparatur pemerintah desa terdiri dari unsur-unsur yang tugasnya masing-masing ialah:

- a) unsur staf memberikan pelayanan atribusi,
- b) unsur pelaksanaan ialah pelaksanaan teknis di lapangan,
- c) unsur kecamatan membantu kepala desa di wilayah bagian desa yang disebut ketua lingkungan.

jumlah dan juga komposisi pegawai, unsur pelaksana dan juga unsur wilayah tersebut di atas disesuaikan dengan kebutuhan dan juga kondisi sosial budaya setempat.

3) Tata kerja

Dalam menjalankan tugasnya, kepala desa dan perangkat desa memiliki kewajiban untuk berkoordinasi, mengintegrasikan, dan menyelaraskan kegiatan baik di lingkungan desa maupun dengan organisasi lain sesuai tugas yang diemban. Diharapkan bahwa struktur dan fungsi pemerintahan desa ini dapat memberikan pelayanan dan menjalankan tugas serta kewajiban sebagai pelayan masyarakat dan negara. Hal ini memungkinkan mereka untuk bekerja sama dalam melaksanakan tugas dan manfaat tersebut, dengan aturan desa yang dijalankan secara gotong royong. Peraturan desa ini akan diawasi oleh lembaga pemerintahan desa dan masyarakat setempat. Manusia memegang peran penting sebagai motor penggerak dalam pemerintahan daerah, karena itu, faktor utama dalam mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah adalah manusia.

Manusia sebagai pelaksana pemerintahan bisa digolongkan menjadi beberapa golongan yang masing-masing ialah:

- a) Pemerintah Daerah terdiri kepala daerah
- b) alat-alat pelengkap terdiri dari aparatur
- c) Rakyat biasa

Komponen ini sangat penting dalam mewujudkan pemerintahan daerah yang tangguh dan efektif dalam pembangunan daerah adalah otonomi daerah. Dengan otonomi

daerah, pemerintah daerah dapat membuktikan kemampuannya dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah sesuai dengan keinginan dan kebutuhan masyarakat setempat.

Pemerintahan masa depan harus bijaksana dan mampu menerjemahkan kebijakan publik menjadi langkah-langkah operasional yang kreatif dan inovatif, berorientasi pada kepentingan masyarakat. Untuk mewujudkan smart government, diperlukan aparaturnya yang cerdas. Oleh karena itu, pengembangan SDM aparatur pemerintah harus ditingkatkan melalui rekrutmen yang benar-benar menjamin perolehan sumber daya yang berkualitas, pembinaan melalui lembaga pendidikan, program pelatihan yang memungkinkan tersedianya tenaga kerja siap pakai, peningkatan kesejahteraan yang memadai, dan jaminan hari tua yang nyata.

Kualitas SDM di Indonesia, khususnya birokrasi daerah, harus ditingkatkan mengingat besarnya tugas pemerintah daerah. Saat ini, Indonesia masih tertinggal jauh dari negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, dan Brunei Darussalam. Daerah yang sedang berjuang membutuhkan sumber daya manusia yang bisa diandalkan sebagai organisasi pemerintah maupun perangkat pemerintah daerah sebagai lembaga pengabdian kepada masyarakat. Meskipun kontrol terhadap birokrasi masih sulit dihilangkan, kesadaran anggota birokrasi terhadap tugas pelayanan,

duplikasi tugas dan fungsi, serta rendahnya produktivitas harus ditingkatkan.

Strategi pemerintahan desa pada dasarnya adalah rencana yang disusun oleh pemerintah desa untuk menjamin berlangsungnya proses pendayagunaan sumber daya manusia dan lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan tertentu.

2.3 Kesejahteraan Masyarakat

Kata "kesejahteraan masyarakat" berasal dari gabungan kata "*Welfare*" dan "*Community*" dalam Bahasa Inggris. "*Welfare*" berarti kesejahteraan, sedangkan "*Community*" berarti komunitas atau masyarakat (Hornby, 2000: 344). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (Tim Redaksi KBBI, 2005: 1011), kesejahteraan masyarakat terdiri dari dua kata, yaitu "kesejahteraan" yang merujuk pada keadaan sejahtera yang meliputi rasa aman, sentosa, makmur, dan selamat, serta "warga" yang mengacu pada sejumlah orang dalam kelompok tertentu yang membentuk perikehidupan berbudaya.

Kemakmuran adalah tatanan kehidupan sosial, material, dan spiritual yang diikuti dengan rasa aman, kesusilaan, serta tatanan pribadi, rumah tangga, dan sosial. Hal ini memungkinkan setiap warga negara untuk memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan sosialnya dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Dalam rangka mensejahterakan rakyatnya, negara perlu mempersiapkan strategi yang baik dengan menggunakan berbagai indikator

yang dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Arsyad et al (2011) menyebutkan sembilan indikator prasyarat untuk solusi permasalahan pembangunan di pedesaan, yaitu infrastruktur fisik, ekonomi, pendidikan, dan kesehatan.

1. Kondisi Pendidikan
2. Kondisi kesehatan
3. Pembangunan pertanian
4. Tingkat industrialisasi
5. Perkembangan usaha non-pertanian
6. Tingkat rawan bencana
7. Aspek kelembagaan dan modal sosial
8. Aspek sosial budaya

Setiap indikator pembangunan tersebut, memerlukan strategi yang tepat untuk bisa diwujudkan, yang secara keseluruhan bermuara pada tercapainya kesejahteraan rakyat.

Desentralisasi yang memberikan kewenangan lebih besar kepada provinsi kemudian dijadikan momentum untuk mereduksi regulasi dan juga pranata sosial bahkan meniadakannya sama sekali. karena: pembangunan kesejahteraan masyarakat dianggap boros dan juga karena hanya perlu dilakukan jika pertumbuhan ekonomi ataupun pendapatan asli daerah (PAD) tinggi. faktanya, studi di beberapa negara menyatakan bahwa kemampuan ekonomi tidak secara otomatis dan juga linier terkait dengan pembangunan kesejahteraan masyarakat (Suharto, 2006: 85).

Seal dan juga Bruzy (dalam Kusnadi, 2013:8) mengatakan bahwa kesejahteraan sosial ialah kesejahteraan suatu masyarakat yang meliputi kesehatan, keadaan ekonomi, kebahagiaan dan juga kualitas hidup masyarakat. midgley (dalam Sutomo, 2006: 12) menjelaskan bahwa kesejahteraan sosial ialah keadaan kesejahteraan sosial yang terdiri dari tiga unsur: pertama, seberapa tinggi masalah sosial dikendalikan; kedua, sejauh mana kebutuhan terpenuhi, dan juga ketiga, sejauh mana peluang yang ada bagi individu, keluarga, komunitas, dan juga bahkan masyarakat.

Sedangkan di Indonesia konsep kesejahteraan sosial tidak lepas dari apa yang telah dirumuskan dalam undang-undang nomor 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial pasal 1 angka 1.:

“Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga Negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.”

Rumusan di atas menggambarkan kesejahteraan sosial sebagai suatu keadaan yang secara ideal digambarkan sebagai suatu tatanan kehidupan yang meliputi kehidupan material dan juga spiritual, dengan tidak mengutamakan aspek yang satu dari yang lain, tetapi berusaha melihat upaya untuk menemukan titik keseimbangan. titik keseimbangan yang dimaksud ialah keseimbangan antara aspek sosial, material, dan juga spiritual. (adi, isbandia rukminto, 2013: 23-24)

Ditinjau dari pengertian ilmu kesejahteraan sosial, pada dasarnya ilmu kesejahteraan sosial ialah ilmu yang berusaha mengembangkan gagasan, strategi, dan juga teknik untuk meningkatkan taraf kesejahteraan suatu

masyarakat. sedangkan jika kita melihat pengertian kesejahteraan sosial yang dikemukakan oleh Midgley di atas, maka ilmu kesejahteraan sosial bisa didefinisikan sebagai ilmu terapan yang mempelajari dan juga mengembangkan kerangka pemikiran dan juga metodologi yang bisa digunakan). Dari pengertian tersebut bisa diketahui bahwa ilmu kesejahteraan sosial pada dasarnya ialah: 1) ilmu yang bisa diterapkan dalam kehidupan nyata (applied in nature); 2) mengkaji secara teoritis dan juga metodologis tentang upaya peningkatan kualitas hidup (standard of living) suatu masyarakat. (adi, isbandi rukminto, 2013: 23-24)

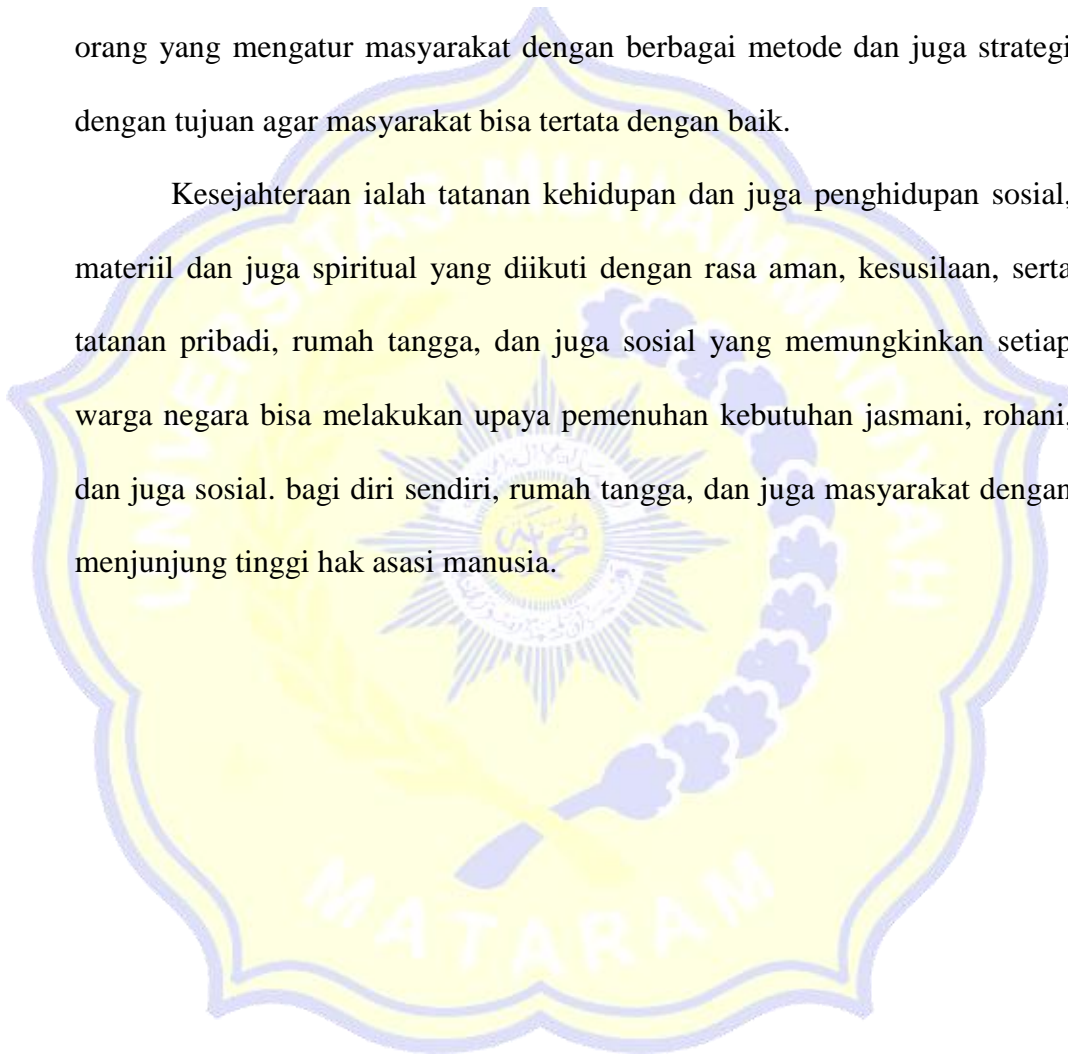
2.4 Kerangka Penelitian

Kerangka studi yang baik secara teoritis akan menjelaskan hubungan antar variabel yang akan diteliti. sehingga secara teoritis perlu dijelaskan hubungan antara variabel independen dan juga dependen. Jika dalam studi terdapat variabel moderator dan juga intervensi, maka perlu juga dijelaskan mengapa variabel tersebut dilibatkan dalam pengkajian. hubungan antar variabel, kemudian dirumuskan menjadi suatu paradigma evaluasi. Oleh karena itu, dalam setiap penyusunan paradigma kajian harus didasarkan pada kerangka evaluasi (Sugiyono, 2010: 60).

Pemerintah desa ialah pemerintahan tingkat terendah langsung di bawah pimpinan kepala desa ataupun lura yang mengurus sendiri urusan rumah tangganya yang terdiri dari kepala desa dan juga lembaga musyawarah desa. Dari pengertian diatas bisa disimpulkan bahwa pemerintah desa ialah kepala desa dan juga perangkat desa sebagai unsur pelanggaran terhadap

pemerintahan desa. Pemerintah desa sendiri berfungsi untuk mengontrol dan juga menyelenggarakan pemerintahan yang ada di desa, segala kegiatan yang dilakukan di desa dikoordinasikan oleh kepala desa ataupun kepala desa. Pengertian pemerintahan ialah suatu lembaga yang terdiri dari sekelompok orang yang mengatur masyarakat dengan berbagai metode dan juga strategi dengan tujuan agar masyarakat bisa tertata dengan baik.

Kesejahteraan ialah tatanan kehidupan dan juga penghidupan sosial, materiil dan juga spiritual yang diikuti dengan rasa aman, kesusilaan, serta tatanan pribadi, rumah tangga, dan juga sosial yang memungkinkan setiap warga negara bisa melakukan upaya pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani, dan juga sosial. bagi diri sendiri, rumah tangga, dan juga masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Rancangan Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang menghasilkan prosedur analisis yang tidak menggunakan prosedur analisis statistik atau metode pengukuran kuantitatif lainnya. Sugiyono (2015:-2) mendefinisikannya sebagai berikut: “Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk menelaah situasi objektif yang alamiah (berlawanan dengan eksperimen), peneliti adalah instrumen utama, dan teknik pengumpulan data dilakukan melalui triangulasi (kombinasi) . , analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih dari dapat digeneralisasikan.”

Tujuan penggunaan metode kualitatif, dalam penelitian ini untuk menggambarkan” Strategi Pemerintah Desa dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Gunungsari Kecamatan Gunungsari”. Terdapat beberapa bentuk pendekatan dalam penelitian kualitatif antara lain sebagai berikut:

1. Etnografi

Yang dipelajari dalam penelitian ini adalah kelompok-kelompok budaya dalam setting alamiah selama kurun waktu tertentu dengan tujuan untuk memahami budaya kelompok tersebut.

2. *Grounded Theory* (Penyusunan Teori Dari Bawah)

Penelitian ini bertujuan untuk menyimpulkan suatu teori dengan menggunakan tahapan pengumpulan data dan jenis data yang saling berhubungan.

3. Studi Kasus

Obyek penyelidikan adalah satu subjek atau fenomena (peristiwa) dari suatu periode dan kegiatan tertentu (biasanya program, peristiwa, proses, organisasi, atau kelompok sosial) dan informasi rinci dikumpulkan dengan menggunakan prosedur pengumpulan data selama kasus berlangsung.

4. Fenomenologi

Dalam penelitian ini, peneliti mengkaji pengalaman manusia melalui deskripsi partisipan penelitian untuk memahami pengalaman hidup partisipan. (Afifudin, dkk, 2012: 86-88).

Dari keempat pendekatan penelitian tersebut di atas, peneliti menggunakan pendekatan fenomenologis. Pendekatan fenomenologis adalah memahami makna peristiwa; penelitian eksplorasi dan interpretatif; Ini adalah studi tentang fenomena (fenomena sosial alam) dan mencoba memahami makna dari suatu peristiwa atau proses di mana orang bias dalam situasi atau konteks tertentu. Dalam beberapa kasus, manusia.

Inti dari penelitian ini adalah mengamati orang-orang di lingkungannya; berinteraksi dengan mereka; Mencoba memahami bahasa dunia di sekitar mereka dengan tujuan mendapatkan data yang mereka

butuhkan. Ini berarti memahami mata pelajaran yang diajarkan. Menurut Edmund Husserl dalam Saebani (2009:27), hakikat berpikir fenomenologis adalah menemukan pikiran yang benar, yang harus kembali ke benda. Selain itu, Dalam metodologi penelitian fenomenologis kualitatif; Teori tidak hanya mempersempit bidang fenomena alam, tetapi juga memaksanya untuk memisahkan komponen-komponennya. Oleh karena itu, teori lahir dengan sendirinya atau oleh peristiwa-peristiwa yang memberikan dirinya sendiri (Saebani, 2009: 31).

Dari uraian di atas, Dapat disimpulkan bahwa penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi.

3.2 Lokasi Penelitian

Guna memperoleh informasi untuk menjawab permasalahan yang timbul; Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Gonsari Barat. Penelitian ini akan dilaksanakan sesuai dengan tema strategi pemerintah desa dalam memajukan kesejahteraan sosial masyarakat desa Gunungsari. Kabupaten Lombok memiliki strategi untuk meningkatkan jaminan sosial di desa ini. Oleh karena itu dalam penelitian ini peneliti melakukan penelitian dan strategi pemerintah desa untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat sehingga peneliti dapat memperoleh informasi yang diperlukan untuk memecahkan masalah tersebut sesuai teori ditentukan oleh peneliti.

3.3 Jenis dan Sumber Data

3.3.1 Jenis Data

Dalam melakukan penelitian, peneliti membutuhkan informasi yang akurat untuk membenarkan hasil penelitian. Ada dua jenis data dalam penelitian, data kualitatif dan data kuantitatif. (Arikunto 2004: 98).

- a. a. Data kualitatif adalah data yang berbentuk deskriptif melalui penelitian sosial.
- b. b. Data kuantitatif adalah penelitian yang menghitung data dalam bentuk angka.

Dari jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif.

3.3.2 Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini menurut Sugiyono (2015: 62), ada dua sumber data yaitu:

- a. Sumber data primer adalah sumber data yang secara langsung menyediakan data untuk pengumpulan data.
- b. Sumber data sekunder adalah sumber yang tidak secara langsung menyediakan data untuk pengumpulan data, misalnya mengumpulkan data melalui orang lain atau melalui dokumen.

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya tanpa perantara atau data primer adalah data yang langsung diperoleh atau dikumpulkan di lapangan oleh peneliti atau

orang yang berkepentingan. Data primer ini disebut juga data sumber yang diberikan langsung kepada pengumpul data; Peneliti mengartikan bahwa data primer adalah informasi yang diperoleh langsung dari hasil wawancara dan observasi terhadap subjek penelitian. Data mentah ini digunakan untuk mendapatkan informasi menggunakan data sekunder; yaitu melalui pengumpulan atau pengelolaan data yang bersifat dokumen atau data; Data tersebut terkait dan didukung oleh data primer.

Mengenai sumber data berupa responden dan informan juga dikatakan sebagai sumber data berupa orang (*people*). Sumber data peristiwa atau kejadian selama penelitian disebut juga sumber data spasial. Sumber data dalam bentuk dokumen atau sastra; angka, Sumber data dikatakan berupa gambar atau simbol (*paper*).

3.4 Metode Penentuan Informan Penelitian

3.4.1 Pengertian Informan

Informan (Moleong, 2013:132) adalah pengguna yang memberikan informasi tentang kondisi dan situasi yang berkaitan dengan setting penelitian. Pengertian lain informan adalah sebagai pengembalian data penelitian dalam rangka pemeriksaan silang data (Bungin 2011: 133).

Oleh karena itu, informan jelas; Seseorang yang memiliki pengetahuan aktual tentang isu atau masalah tertentu, membuat

informasi yang akurat dan dapat diandalkan tersedia baik dalam bentuk pernyataan.

3.4.2 Metode Penentuan Informan

Dalam studi ini, Penelitian kualitatif berfokus pada pihak-pihak yang subjek penelitiannya menjadi sasaran penelitian. Penelitian ini menggunakan metode purposive sampling, artinya sumber informasi dipilih secara sengaja sesuai dengan tujuan penelitian.

Istilah "populasi" tidak digunakan dalam penelitian kualitatif. Alih-alih, Kajian ini merujuk pada konsep "konteks sosial" yang dikemukakan oleh Spradley (Sugiyono, 2015: 49). di suatu tempat dalam situasi sosial; Ada tiga elemen utama yang bekerja dalam koordinasi dengan protagonis.

Seperti yang dijelaskan oleh Lincoln dan Guba (Sugiyono, 2015: 54), pengambilan sampel dalam penelitian kualitatif (naturalistik) berbeda dengan pengambilan sampel dalam penelitian konvensional (kuantitatif). Pengambilan sampel dalam penelitian kualitatif tidak didasarkan pada perhitungan statistik. Alih-alih, Sampel dipilih dengan tujuan memperoleh informasi yang maksimal, bukan generalisasi untuk populasi yang lebih besar.

Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada tempat, Pendekatan kualitatif dengan purposive sampling digunakan untuk memahami situasi sosial yang melibatkan aktor dan aktivitas. Penentuan sampel dalam penelitian ini tidak mengandalkan

perhitungan statistik tetapi lebih menitikberatkan pada perolehan informasi yang relevan dan mendalam.

3.4.3 Cara Menentukan Informan

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. Sugiyono (2015: 53-54) menjelaskan bahwa teknik ini melibatkan pemilihan sampel data berdasarkan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tersebut bisa berupa keahlian atau pengetahuan yang dimiliki oleh individu yang dipilih, atau mungkin karena posisinya yang memungkinkan peneliti untuk lebih mudah menjelajahi objek atau situasi sosial yang sedang diteliti. Dengan menggunakan teknik ini, peneliti dapat memilih sampel yang dianggap paling relevan dan bermanfaat untuk mencapai tujuan penelitian.

Berdasarkan teori tersebut, dapat disimpulkan bahwa subjek penelitian dapat diperoleh melalui penggunaan metode *purposive sampling*. Metode ini melibatkan pemilihan narasumber yang merupakan pemerintah desa, dengan jumlah sebanyak lima orang, berdasarkan pertimbangan tertentu.

3.4.4 Macam-macam informan

- a. Informan kunci merupakan individu yang memiliki pengetahuan dan akses terhadap informasi penting yang diperlukan dalam penelitian, atau mereka yang memiliki pemahaman yang mendalam tentang permasalahan yang sedang diselidiki". Informan kunci

dalam penelitian ini adalah, Narasumber yang diambil sebanyak 5 orang anatar lain:

No	Nama	Keterangan
1	H.Miliki. S.Pi	Kepala Desa Gunungsari
2	Hadrina. SHI	Sekartaris Desa
3	Mayadi Putera	Kaur keuangan
4	Siti Zaenab	Kaur perencanaan
5	Asriani	Kaur tata usaha dan umum

- b. Dalam penelitian ini, masyarakat Desa Gunungsari menjadi sumber informasi yang dipilih berdasarkan pertimbangan dan keterkaitannya dengan permasalahan yang sedang diteliti.

No	Nama	Keterangan
1	Ibrahim	Pemberdayaan gabungan kelompok tani
2	Asmat	Pemberdayaan gabungan kelompok tani
3	Toni	Program pemberdayaan masyarakat petani gula aren
4	Ahmad	Program pemberdayaan masyarakat petani gula aren
5	Yusuf	Program kewirausahaan bagi masyarakat pengerajin kursi dan lemari
6	Hasan	Program kewirausahaan bagi masyarakat pengerajin kursi dan lemari
7	Salewa	Program Badan Usaha Mlik Desa
8	Mardiyati	Program Badan Usaha Mlik Desa

3.5 Metode Pengumpulan Data

Mengumpulkan data dengan teknik yang tepat merupakan kunci strategis dalam penelitian. Tanpa menguasai teknik pengumpulan data, penelitian tidak akan berhasil mendapatkan data yang memenuhi standar yang ditetapkan. Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan secara

alamiah dengan menggunakan sumber data primer. Beberapa teknik yang sering digunakan dalam pengumpulan data kualitatif meliputi observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Ketiga teknik ini digunakan untuk memperoleh data yang akurat dan dapat dipercaya.

3.5.1 Metode Observasi

Observasi merupakan proses sistematis dalam mengamati dan mencatat unsur-unsur yang terlihat dalam suatu fenomena atau peristiwa dalam rangka penelitian.

Menurut Nasution (2012: 107) secara garis besarnya observasi dapat dilakukan dengan:

- 1) Partisipasi atau partisipan adalah peneliti yang terlibat dalam kelompok yang sedang ditelitinya, seperti menjadi salah satu anggota pemerintah desa yang sedang diselidikinya.
- 2) Ketika tidak ada partisipan atau non-partisipan, seorang peneliti dapat melakukan pengamatan secara menyamar untuk menghindari terdeteksinya kehadirannya sebagai pengamat.

Namun, ada juga opsi untuk melakukan pengamatan secara terbuka dan jelas.

Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan metode observasi non-partisipatif yang melibatkan pengamatan langsung terhadap kegiatan yang terjadi dalam masyarakat, khususnya yang

berkaitan dengan Strategi Pemerintah Desa dalam meningkatkan kesejahteraan di Desa Gunungsari, Kecamatan Gunungsari. Peneliti akan mencatat data yang relevan dengan fenomena yang sebenarnya tanpa melakukan perubahan atau intervensi terhadap realitas yang sedang diamati. Dengan demikian, peneliti hanya akan mengamati kegiatan tersebut secara langsung tanpa melakukan tambahan atau pengurangan apapun.

3.5.2 Metode Wawancara

Menurut Saebania (Saebania dkk, 2009: 133) wawancara atau interview terdiri atas beberapa jenis yaitu sebagai berikut:

- a. Wawancara terstruktur adalah jenis wawancara di mana pertanyaan-pertanyaannya telah disiapkan sebelumnya menggunakan pedoman wawancara.
- b. Wawancara semiterstruktur adalah jenis wawancara yang memberikan kebebasan kepada peneliti dalam mengajukan pertanyaan, namun tetap mengacu pada pedoman yang telah disiapkan sebelumnya.
- c. Wawancara tidak terstruktur adalah jenis wawancara di mana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara dan memiliki kebebasan penuh dalam mengajukan pertanyaan.

Dalam penelitian ini, digunakan wawancara semiterstruktur. Hal ini berarti peneliti telah membuat pedoman wawancara yang digunakan sebagai panduan dalam melakukan wawancara yang

mendalam. Meskipun peneliti memiliki kebebasan dalam mengajukan pertanyaan, ia tetap mengacu pada pedoman wawancara yang telah disiapkan sebelumnya. Dengan menggunakan pendekatan ini, peneliti dapat memperoleh informasi yang lebih terstruktur dan mendalam dari responden.

Wawancara merupakan suatu proses interaksi tanya jawab dalam penelitian yang melibatkan dua orang atau lebih. Metode wawancara digunakan untuk mengumpulkan data dengan cara mewawancarai pihak terkait. Wawancara dapat dilakukan secara formal atau informal, baik dengan jadwal yang telah ditentukan maupun tanpa jadwal yang pasti, serta bisa dilakukan di tempat resmi maupun tidak resmi. Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan secara langsung dengan sampel yang telah ditentukan oleh peneliti. Melalui proses wawancara ini, peneliti dapat memperoleh data yang sangat berharga.

Pengumpulan data dengan menggunakan metode wawancara bertujuan untuk mendapatkan informasi dan keterangan yang relevan. Oleh karena itu, peneliti akan melakukan wawancara langsung dengan kepala desa untuk memperoleh informasi sebanyak mungkin atau informasi yang sangat orisinal. Dengan memaksimalkan proses wawancara, peneliti dapat memperoleh wawasan yang mendalam dan mendapatkan data yang berkualitas tinggi.

3.5.3 Metode Dokumentasi

Dalam penelitian, dokumentasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang penting. Menurut Sugiyono (2015: 82), dokumen dapat berupa catatan peristiwa yang sudah berlalu, seperti surat, catatan harian, sejarah kehidupan, cerita, biografi, gambar seperti foto atau sketsa, serta karya-karya monumental dari seseorang.

Berdasarkan teori tersebut, peneliti dapat menyimpulkan bahwa dalam menggunakan teknik dokumentasi, mereka akan menggunakan berbagai alat dan bahan, seperti handphone, kamera, alat rekaman, alat tulis seperti buku dan pulpen, serta pedoman wawancara. Dengan menggunakan alat-alat ini, peneliti dapat mengumpulkan data yang diperlukan untuk melengkapi penelitian mereka.

Dalam era digital seperti sekarang, handphone dan kamera menjadi alat yang sangat berguna dalam dokumentasi. Handphone dapat digunakan untuk mengambil foto atau video, sedangkan kamera dapat menghasilkan gambar yang lebih berkualitas. Alat rekaman juga penting untuk merekam wawancara atau peristiwa penting lainnya. Selain itu, alat tulis seperti buku dan pulpen tetap menjadi pilihan yang baik untuk mencatat informasi penting secara manual. Pedoman wawancara juga diperlukan agar peneliti memiliki panduan yang jelas saat melakukan wawancara dengan responden. Dengan menggunakan berbagai alat dan bahan ini, peneliti dapat memastikan bahwa mereka memiliki dokumentasi yang lengkap dan akurat untuk mendukung

penelitian mereka. Teknik dokumentasi yang baik akan membantu peneliti dalam menganalisis data dan menghasilkan temuan yang valid dan bermakna.

3.6 Instrumen Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, peneliti menjadi instrumen utama yang digunakan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan berbagai alat seperti buku catatan, pulpen, ponsel, kamera, dan alat rekam. Nasution (1986) dalam Sugiyono (2016: 60) menyatakan bahwa dalam penelitian kualitatif, tidak ada pilihan lain selain menggunakan manusia sebagai instrumen utama. Hal ini disebabkan oleh ketidakpastian dalam berbagai hal, seperti masalah penelitian, fokus penelitian, prosedur penelitian, hipotesis yang digunakan, dan bahkan hasil yang diharapkan. Semua hal tersebut tidak dapat ditentukan secara pasti dan jelas sebelumnya. Oleh karena itu, peneliti sendiri menjadi satu-satunya alat yang dapat mencapainya, karena segala sesuatu masih perlu dikembangkan sepanjang penelitian berlangsung.

Sebagai peneliti, kita harus memastikan bahwa kita telah memenuhi persyaratan yang diperlukan untuk melakukan penelitian kualitatif di lapangan dengan sukses. Validasi terhadap diri kita sebagai instrumen penelitian melibatkan pemahaman yang mendalam tentang metode kualitatif, penguasaan yang kuat terhadap bidang yang diteliti, serta kesiapan akademik dan logistik yang memadai sebelum memulai penelitian. Proses validasi ini dilakukan oleh peneliti sendiri melalui evaluasi diri terhadap pemahaman tentang metode kualitatif, penguasaan teori dan wawasan tentang bidang yang

diteliti, serta persiapan yang telah kita lakukan sebelum memasuki lapangan. Dengan melakukan validasi ini, kita dapat memastikan bahwa kita telah secara komprehensif siap untuk menjalankan penelitian dengan sukses.

3.7 Metode Analisis Data

Menurut peneliti Miles dan Huberman pada tahun 1984, dalam bukunya yang dikutip oleh Sugiyono pada tahun 2015, mereka menyatakan bahwa dalam analisis data kualitatif, aktivitas dilakukan secara interaktif dan berkelanjutan hingga selesai. Hal ini berarti bahwa proses analisis data melibatkan tahapan reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan atau verifikasi data. Dalam proses ini, data yang digunakan akan menjadi lebih kaya dan komprehensif seiring dengan berjalannya waktu.

1. Pengumpulan Data

Sebelum memulai analisis data, langkah awal yang harus dilakukan adalah mengumpulkan data. Proses pengumpulan data dilakukan oleh peneliti dengan cara turun langsung ke lapangan penelitian dan mengunjungi sumber-sumber informasi terkait dengan topik penelitian. Setelah semua data terkumpul, barulah analisis dapat dilakukan. Tahapan analisis data meliputi reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data untuk mencapai kesimpulan yang diinginkan.

2. *Data reduction* (Reduksi Data)

Mereduksi data berarti merangkum data, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran

yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan. Setelah dilakukan reduksi data yang dianggap sudah falit, maka dilakukan pekerjaan selanjutnya yaitu penyajian data (data display).

3. *Data Display* (Penyajian Data)

Setelah data dikurangi, langkah berikutnya adalah menampilkan data. Dalam penelitian kualitatif, data dapat disajikan dalam berbagai bentuk seperti uraian singkat, diagram, dan sejenisnya. Menurut Miles and Huberman, "cara yang paling umum digunakan untuk menampilkan data penelitian kualitatif di masa lalu adalah melalui teks naratif."

4. *Conclusion Drawing/Verification*

Menurut Miles dan Huberman, langkah ketiga dalam analisis data kualitatif melibatkan penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang diajukan bersifat sementara dan dapat berubah jika tidak ada bukti yang kuat dan mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Namun, jika kesimpulan yang diajukan pada tahap awal didukung oleh bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan untuk mengumpulkan data, maka kesimpulan tersebut dapat dianggap sebagai kesimpulan yang dapat dipercaya.